



KERJA SAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pinjaman PEN Daerah

Merupakan sumber alternatif **dukungan pendanaan bagi daerah**, khususnya bagi daerah-daerah yang **memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah** agar mampu **membayai** berbagai belanja prioritas di daerah.

Total Rp10 T (dari APBN 2020)

Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan oleh PT SMI (Persero) sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.



KERJA SAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pemda pertama yang memanfaatkan fasilitas

Pinjaman PEN Daerah:

DKI Jakarta Rp12,5 T

sebesar Rp4,5 T untuk 2020
sebesar Rp8 T untuk 2021

untuk pembangunan sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Jawa Barat Rp4 T

sebesar Rp1,904 T untuk 2020
sebesar Rp2,098 T untuk 2021

untuk pembangunan infrastruktur sosial, logistik, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan.





KERJA SAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund/VGF*)

Dukungan Pemerintah Pusat untuk **proyek infrastruktur** yang dilaksanakan dengan skema **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**, seperti pada Proyek KPBU Pengelolaan Persampahan Legok Nangka, Jawa Barat.





KERJA SAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Penempatan Uang Negara pada Bank

Pembangunan Daerah

Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tahap

1

Pemerintah telah menempatkan Uang Negara kepada **Bank Himbara** sebesar **Rp30 T.**

Tahap

2

Pemerintah akan menempatkan Uang Negara kepada **Bank Pembangunan Daerah (BPD).**

4 BPD yang terpilih adalah **BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah.**

Saat ini, beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.

